

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SUMATERA UTARA

Ega Marito Silalahi¹, Emi Octriani², Tetty Tiurma Uli Sipahutar³

¹²³*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prima Indonesia, Medan*

Email : egasilalahi56@gmail.com¹, ratuhapis.tetty@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk memenuhi prinsip *value for money* baik dari segi pemasukan maupun pengeluaran secara ekonomis, efektif dan efisien. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk menambah asset tetap. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap PDRB, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kebijakan dan koreksi keputusan bagi pemerintah daerah dalam menentukan alokasi dana, dan diharapkan pemerintah daerah lebih selektif dalam penggunaan dana serta mengembangkan potensi perekonomian daerah.

Kata Kunci : PDRB, PAD, DAU, Belanja Modal, SiLPA

ABSTRACT

Regional financial management aims to meet the principle of value for money both in terms of income and expenditure economically, effectively and efficiently. Local governments allocate funds in the form of a capital budget in the Regional Revenue and Expenditure Budget to increase fixed assets. So far, regional expenditures have been mostly used for routine expenditures which are relatively less productive. The purpose of this paper is to determine the effect of regional financial management on economic growth significantly. The population in this study is the Regency/City of North Sumatra Province in 2010-2020. The research data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of hypothesis testing can be concluded that Regional Original Income (PAD) has an effect on GRDP, General Allocation Funds have no significant effect on GRDP, Capital Expenditures have a significant effect on GRDP, and SiLPA has a significant effect on GRDP. The results of this study can be used as policy and decision corrections for local governments in determining the allocation of funds, and it is hoped that local governments will be more selective in the use of funds and develop regional economic potential.

Keywords: GRDP, PAD, DAU, Capital Expenditure, SiLPA

BAB 1

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah mengalokasikan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap. Pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan keuangan daerah dengan baik karena merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun fenomena umum yang terjadi, tampaknya alokasi keuangan daerah belum sepenuhnya terlaksana untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat, karena pengelolaan keuangan daerah belum berorientasi publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan pengeluaran yang berbenturan dengan kepentingan kelas semata. Adanya kepentingan politik lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penganggaran menyebabkan alokasi keuangan daerah terdistorsi dan seringkali tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan ekonomis dengan tujuan akhir meningkatkan pelayanan publik. dalam pengelolaan aset berkaitan dengan pengeluaran pemeliharaan dan sumber pendapatan. Namun, faktanya alokasi pendapatan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk belanja rutin. Kegiatan belanja pemerintah daerah dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai operasional pemerintah. Pembiayaan belanja tersebut memerlukan sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan output perkapita yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka panjang, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi mampu mengukur tingkat perkembangan aktifitas pada sector-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Hasan, 2012). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga meningkatkan kemakmuran masyarakat, salah satu tujuan dari pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya (Sugiarthi & Supadmi, 2014). Prioritas utama yang dilakukan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diproses dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hal ini terwujud dengan adanya infrastruktur dan sarana prasarana penunjang kegiatan perekonomian (Jaya & Dwirandra, 2014). Oleh karena itu salah satu factor penentu dari pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah (Sugiarthi & Supadmi, 2014). Modebe et al, (2012) menyatakan pengeluaran rutin pemerintah berulang memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran untuk kegiatan modal berdampak negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adanya pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat mempengaruhi kemajuan daerah baik secara ekonomi, efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Sularso & Restianto, 2011). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Mbedzi & Gondo (2010) menghasilkan inefisiensi kinerja keuangan terhadap belanja daerah. Adi (2006) menyebutkan bahwa ada tiga komponen dasar dalam mengukur pertumbuhan ekonomi antara

lain: akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara positif. Dengan komponen tersebut, akumulasi modal merupakan komponen yang dapat diteliti dan dilihat dalam perkembangan kuantitatif yang terkait dengan keuangan daerah (Sulaso & Restianto, 2011). Jika pengeluaran digunakan secara produktif akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun jika digunakan secara berlebihan pengeluaran ini tidak lagi produktif sehingga mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi

Pemerintah daerah dalam rangka penyusunan anggaran dituntut untuk kreatif dan inovatif, hal ini disebabkan karena pada saat penyusunan anggaran akan menemukan kendala dalam hal pengalokasian, masalah ini umumnya terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh daerah (Hidayat & Maski, 2013). Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah, diharapkan agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Hidayat & Maski, 2013). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur dan memberikan kemudahan fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan kemudahan fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investor (Ardhani, 2011).

Pembangunan infrastruktur mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan APBD untuk belanja modal dan tidak hanya dihabiskan untuk belanja pegawai dan operasional (Wandira, 2013). Undang-undang nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa sumber pembiayaan pemerintah daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana pembangunan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), selain itu berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah. Arifah et al, (2014) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya merupakan sumber utama bagi daerah untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga pada akhirnya pemerintah daerah mampu terlepas dari ketergantungan transfer dana perimbangan dari pusat. Namun disatu sisi pemerintah daerah dihadapkan pada dilema dimana mereka harus meningkatkan terus jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dapat mengimbangi jumlah biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan disisi lain potensi yang dimiliki daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan relative kecil (Miharbi, 2013).

Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan kelengkapan rumah tangga daerahnya (Undang-Undang No. 33 tahun 2004).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam mencapai aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi. Hidayat & Maski, (2013) menyatakan bahwa cenderung menurunnya alokasi belanja modal setiap tahunnya seharusnya menjadi pertanyaan bagi pemerintah sendiri, karena seharusnya belanja modal merupakan belanja yang bersifat produktif dan dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat di daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang mampu menunjang kegiatan perekonomian. Pembangunan aset tetap didanai dari pengalokasian anggaran belanja modal (Jaya, 2014:81). Dengan demikian, terdapat hubungan antara

pengalokasian anggaran belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini senada dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardhana (2011:10) bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di pemerintahan daerah (Ardhini & Handayani, 2011). Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan daerah dan efisiensi sangat diharapkan sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program dan kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar dapat merugikan publik. Salah satu yang merupakan anggaran yang mengganggu yakni SiLPA. Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat hubungan positif antara pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Besar kecilnya suatu wilayah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang sedang berkembang. Semakin banyak daerah yang didukung oleh peningkatan pendapatan perkapita penduduk, sehingga tingkat produktivitas penduduk semakin meningkat, maka kebutuhan belanja daerah juga semakin meningkat. Anggaran belanja daerah didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas umum. Daerah dengan luas wilayah yang lebih besar membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat pelayanan publik jika dibandingkan dengan wilayah yang luasnya terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal (BM), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) di Provinsi Sumatera Utara.

KAJIAN LITERATUR

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan Todaro dan Smith (2011:170) bahwa: Akumulasi Modal (*Capital Accumulation*) akan terjadi jika sebagian tertentu dari pendapatan sekarang ditabung dan diinvestasikan untuk meningkatkan output dan pendapatan dimasa depan. Pabrik, mesin, peralatan, dan bahan baru meningkatkan persediaan modal atau kapasitas (*Capital Stock*) Fisik suatu Negara (Total nilai riil netto semua barang modal fisik produktif) yang memungkinkan upaya mempertinggi tingkat output yang akan dicapai. Investasi langsung yang produktif ini dilakukan dengan berinvestasi dalam apa yang dikenal sebagai Infrastruktur Ekonomi (*Economic Infrastructure*) dan sosial – jalan raya, listrik, air bersih dan sanitasi, komunikasi, dan yang sejenis yang memfasilitasi dan mengintegrasikan kegiatan perekonomian.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

Keterangan :

$PDRB_t$ = Pendapatan Domestik Regional Bruto periode t .

$PDRB_{t-1}$ = Pendapatan Domestik Regional Bruto periode tahun sebelumnya $t - 1$

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan pemda dalam melaksanakan otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar PAD yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemda dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Secara konseptual, perhitungan PDRB menggunakan tiga macam pendekatan yaitu pengeluaran, pendapatan, dan produksi (Arifin, 2011). Nilai Indikator variabel pendapatan asli daerah diukur dengan:

Pendapatan Asli Daerah

*= Pendapatan Pajak Daerah + Pendapatan Retribusi Daerah
+ Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
+ Lain – lain Pendapatan Asli Daerah*

Maryati dan Endrawati (2010) dalam penelitiannya tentang pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatra Barat 2004-2006 membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Selanjutnya, Putri (2015) meneliti pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah 2011-2014, menemukan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penelitian Soroga (2015), dan Arson Abdul Rasyid Nunu (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, Putri (2015) meneliti pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah 2011-2014, menemukan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H2: Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dapat diategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Erlina, dkk, 2015) yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal fisik lainnya. Peningkatan keuangan daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penyerapan yang terlihat dengan optimalnya belanja pembangunan yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Syarat mendasar bagi pembangunan ekonomi adalah tingkat pembangunan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Mallick (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi.

Yuliana (2014) meneliti pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Sumatra 2007-2011 menemukan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini diperkuat oleh Yunisa (2015) yang menemukan bahwa Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kasus kabupaten dan kota di Indonesia 2011-2012.

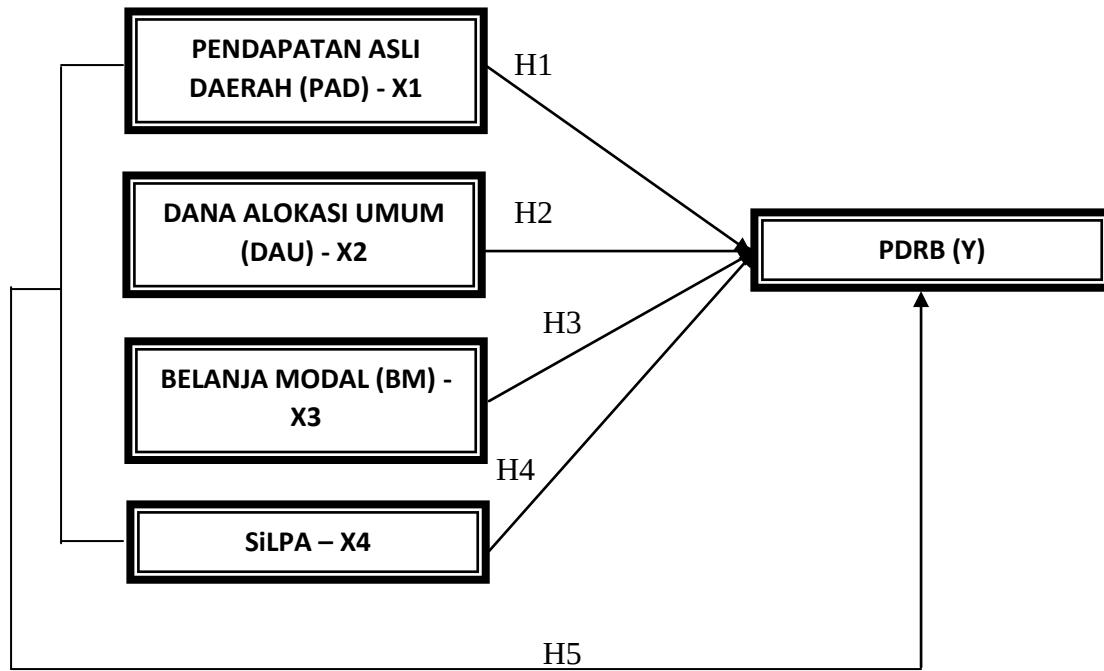
H3: Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh SiLPA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

SILPA itu sendiri merupakan bagian dari struktur pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD). Menurut Kusnandar dan Siswantoro(2012) SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Besar kecilnya SiLPA tergantung tingkat belanja yang dilakukan pemda serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah maka dimungkinkan akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Namun sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka akan diperoleh SiLPA yang kecil. Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat (Ardhani, 2011).

H4: SiLPA berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dibuat skema kerangka konseptual yang ditunjukkan oleh Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan berupa data sekunder dan data runtun waktu (*time series*) yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terdiri dari PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Sumatera Utara periode 2010 s/d 2020. Jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33 Kabupaten/Kota dengan jumlah sampel sebanyak 363.

Data diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan Portal data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif Analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression*) dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) atau metode kuadrat terkecil biasa untuk mendapatkan koefisien garis regresi berganda menggunakan Eviews versi 9.

Spesifikasi model untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, BM, SiLPA terhadap mempengaruhi PDRB di Sumatera Utara selama tahun 2010-2020 yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$PDRB = f(PAD, DAU, BM, SiLPA).....(2.1)$$

Kemudian fungsi tersebut dinyatakan dalam hubungan Y dan X maka,

$$PDRB = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 BM + \beta_4 SiLPA + e_t.....(2.2)$$

Kemudian dari fungsi tersebut ditransformasi ke dalam model persamaan ekonometrika dalam bentuk linier berganda menjadi:

$$\ln(PDRB)_t = \beta_0 + \beta_1 \ln(PAD)_t + \beta_2 \ln(DAU)_t + \beta_3 \ln(BM)_t + \beta_4 \ln(SiLPA)_t + e_t$$

Keterangan:

PDRB : Produk Domestik Bruto

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

BM : Belanja Modal

SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

e_t : Error Time

Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Berdasarkan keadaan tersebut di dalam ilmu ekonometrika, agar suatu model dikatakan baik dan efisien maka perlu dilakukan pengujian sebagai berikut: (Widarjono, 2013)

1. Uji Normalitas

Ghozali (2011:160) menjelaskan bahwa Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

- a. Jika hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan > 0.05 maka data residual terdistribusi dengan normal
- b. Jika hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan < 0.05 maka data residual tidak terdistribusi normal

Untuk menguji normalitas data pada penelitian ini, menggunakan uji Jarque-Bera. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai probabilitas Jarque-Bera (JB) test $> \alpha (0,05)$, maka data dikatakan berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Sugiyono (2014:182) Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui terjadi tidaknya multikolinieritas antar variabel bebas dan dilakukan dengan menyelidiki besarnya interkorelasi antar variabel bebas. Pengujian asumsi klasik Multikolinieritas dapat dilihat dari korelasi variabel-variabel bebas dengan matriks korelasi. Apabila antar variabel bebas memiliki koefisien korelasi di atas 0,9 hal ini menunjukkan adanya multikolinieritas. Selain itu dapat digunakan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance (TOL)*.

3. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011:110): Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian ada atau tidaknya autokorelasi dalam persamaan regresi ini dilakukan dengan melihat keadaan nilai Durbin Watson (DW test). Jika DW hitung terletak lebih kecil dari dL terjadi autokorelasi positif, di antara dL dan dU tidak dapat diputuskan, di antara $dU < DW < 4-dU$ maka bebas autokorelasi, di antara $4-dU$ dan $4-dL$ maka tidak dapat diputuskan, lebih dari $4-dL$ maka terjadi autokorelasi negatif (Gujarati, et al 2012). Metode yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dilakukan dengan cara, yaitu *LM Test*.

4. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139) mengatakan bahwa: “Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Adapun uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Glejser.

5. Uji Statistik

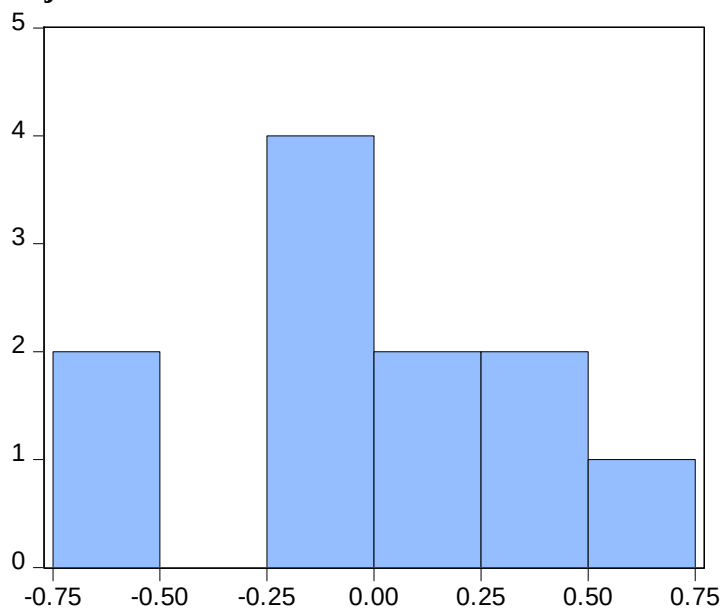
Uji statistik atas model penelitian ini dilakukan dengan uji koefisien determinan (R^2), uji $t_{\text{statistik}}$ dan uji $F_{\text{statistik}}$. Besarnya nilai R^2 adalah $0 < R^2 < 1$, apabila nilainya mendekati 1 maka

model tersebut dapat dikatakan baik, karena semakin dekat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, dan sebaliknya jika nilainya semakin mendekati nol maka berarti semakin jauh hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen sehingga model kurang baik.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Uji Normalitas



Series: Residuals
Sample 2010 2020
Observations 11

Mean	-4.70e-15
Median	-0.088119
Maximum	0.623792
Minimum	-0.625575
Std. Dev.	0.387709
Skewness	-0.087510
Kurtosis	2.160504

Jarque-Bera	0.337051
Probability	0.844910

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa nilai signifikansi residual sebesar $0,8449 > 0,05$ artinya data berdistribusi normal sehingga data tersebut dapat dikatakan memenuhi persyaratan untuk analisis regresi karena memenuhi persyaratan normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Date: 08/03/21 Time: 18:52

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	82.87205	3638.657	NA
LNPAD	0.328598	2026.195	7.640004
LND AU	0.058337	342.6226	9.245868
LNBM	0.562121	3237.181	5.397902
LNSILPA	0.426599	1817.023	8.296681

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh variable memiliki nilai VIF dibawah 10 dan atau tolerance value di atas 0,10. Nilai VIF dan tolerance tersebut menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.378259	Prob. F(2,4)	0.7072
Obs*R-squared	1.749535	Prob. Chi-Square(2)	0.4170

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/03/21 Time: 18:54

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.958982	13.39035	-0.519701	0.6307
LNPAD	0.391031	0.833394	0.469202	0.6634
LND AU	0.181664	0.349849	0.519266	0.6310
LNBM	-0.037150	0.843290	-0.044053	0.9670
LNSILPA	0.073740	0.741383	0.099463	0.9256
RESID(-1)	-0.456334	0.588370	-0.775591	0.4813
RESID(-2)	-0.490515	0.722239	-0.679159	0.5343
R-squared	0.159049	Mean dependent var	-4.70E-15	
Adjusted R-squared	-1.102378	S.D. dependent var	0.387709	
S.E. of regression	0.562161	Akaike info criterion	1.947070	
Sum squared resid	1.264101	Schwarz criterion	2.200276	
Log likelihood	-3.708887	Hannan-Quinn criter.	1.787459	
F-statistic	0.126086	Durbin-Watson stat	2.317822	

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Hasil Output uji LM menunjukan bahwa Nilai Probabilitas signifikan $0,7072 > 0,05$ yang berarti bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.544710	Prob. F(4,6)	0.3016
Obs*R-squared	5.580766	Prob. Chi-Square(4)	0.2327
Scaled explained SS	0.963447	Prob. Chi-Square(4)	0.9153

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/03/21 Time: 18:44

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.932555	2.544539	0.366493	0.7266
LNPAD	-0.058667	0.160228	-0.366145	0.7268
LND AU	0.056795	0.067511	0.841270	0.4324
LNBM	-0.391407	0.209566	-1.867707	0.1110
LNSILPA	0.380336	0.182564	2.083300	0.0824
R-squared	0.507342	Mean dependent var		0.136653
Adjusted R-squared	0.178904	S.D. dependent var		0.154397
S.E. of regression	0.139906	Akaike info criterion		-0.792743
Sum squared resid	0.117441	Schwarz criterion		-0.611882
Log likelihood	9.360087	Hannan-Quinn criter.		-0.906751
F-statistic	1.544710	Durbin-Watson stat		3.010154
Prob(F-statistic)	0.301568			

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

5. Uji Statistik

Hasil analisis regresi terhadap model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini seperti tampak pada tabel berikut:

Dependent Variable: LNPDRB

Method: Least Squares

Date: 08/03/21 Time: 18:40

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-15.29372	9.103409	-1.679999	0.1440
LNPAD	1.630202	0.573235	2.843864	0.0294
LND AU	0.384702	0.241530	1.592768	0.1623
LNBM	1.850244	0.749747	2.467824	0.0486
LNSILPA	-1.710144	0.653146	-2.618319	0.0397
R-squared	0.742069	Mean dependent var		12.78016
Adjusted R-squared	0.570115	S.D. dependent var		0.763403
S.E. of regression	0.500530	Akaike info criterion		1.756655
Sum squared resid	1.503180	Schwarz criterion		1.937517

Log likelihood	-4.661605	Hannan-Quinn criter.	1.642648
F-statistic	4.315510	Durbin-Watson stat	2.391058
Prob(F-statistic)	0.055361		

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hasil penelitian ini terdapat pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika dilihat dari hasil regresi Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di atas, maka dengan besaran pengaruh koefisien Prob. sebesar 0,0486 didapati pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sehingga pernyataan H1 diterima. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Mawarni, dkk (2013), dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Hubungan positif variabel pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh, sesuai dengan teori W.W. Rostow yang menyatakan bahwa pada fase prasyarat tinggal landas, masyarakat mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan berdasarkan kekuatan sendiri dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hasil penelitian ini terdapat tidak berpengaruh signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika dilihat dari hasil regresi Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di atas, maka dengan besaran koefisien Prob. sebesar 0,1623 didapati tidak berpengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sehingga pernyataan H2 diterima. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Santoso (2013), menguji pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung di 33 Provinsi di Indonesia 2007-2011 dengan metode Path Analysis, dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat digunakan sesuai tepat sasaran dan produktif untuk pelayanan masyarakat seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, pembayaran gaji pegawai, tunjangan PNS yang berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah daerah. Signifikansi pengaruh belanja modal disebabkan karena sifat pengelurannya yang langsung mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan pendapatan perkapita dan kualitas layanan publik.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hasil penelitian ini terdapat pengaruh signifikan antara Belanja Modal (BM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika dilihat dari hasil regresi Belanja Modal (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di atas, maka dengan besaran pengaruh koefisien Prob. sebesar 0,0486 didapati pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sehingga pernyataan H3 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Soroga, 2015; Mauli Danayati, 2014; I Ketut Arsa, 2015; Arson Abdul Rasyid Nunu, 2015; Ismail, 2013;

Kristiyan, 2016; Wertianti & Dwirandra, 2013) yang menyatakan bahwa variabel Belanja Modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

Keadaan ini memberi indikasi bahwa Belanja Modal memiliki kontribusi positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Bila pemerintah mampu mencapai tujuan tersebut, maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, masyarakat berperan sebagai prinsipal merupakan objek pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan pelayanan yang baik melalui alokasi belanja modal sehingga aktivitas masyarakat berkembang. Untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi masyarakat harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Adapun sarana dan prasarana tersebut diperoleh dari alokasi anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan dalam APBD. Eksekutif akan mengusulkan anggaran belanja lebih besar dari yang terjadi saat ini. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka Pemda akan meningkatkan alokasi belanja modalnya guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan pra sarana, namun disesuaikan dengan kondisi dan situasi kemampuan daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka Belanja Modal akan semakin meningkat.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hasil penelitian ini terdapat pengaruh signifikan antara SiLPA terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika dilihat dari hasil regresi Belanja Modal (X4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di atas, maka dengan besaran pengaruh koefisien Prob. sebesar 0,00397 didapati pengaruh SiLPA terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sehingga pernyataan H4 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menyatakan bahwa variabel Belanja Modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, SiLPA berpengaruh positif terhadap peningkatan PDRB Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat menggambarkan potensi ekonomi dalam melaksanakan otonomi daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah menggambarkan potensi asli suatu daerah dalam menggali pemberdayaan sumber daya daerahnya untuk diupayakan sebagai nilai ekonomi suatu daerah. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaksana pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi daerahnya, sehingga pendapatan asli daerah akan meningkat. Untuk itu sebaiknya pemerintah daerah melihat potensi-potensi daerah yang ada, kemudian dikembangkan sebagai sumber-sumber pendapatan. Di sisi lain, DAU harus digunakan semaksimal mungkin secara tepat sasaran untuk kemajuan suatu daerah dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaannya. Peningkatan Belanja Modal harus diarahkan untuk kepentingan publik sehingga bisa meningkatkan investasi yang berujung kepada meningkatnya produktivitas masyarakat. Akan tetapi pemerintah daerah harus efisien dan efektif menentukan alokasi Belanja Modal.

SARAN

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sebuah kebijakan dan koreksi dalam pengambilan keputusan. Terlebih untuk pemerintah pusat dalam kebijakan pengalokasian dan pemerintah daerah dalam penggunaan dana. Perlu dilakukan proyeksi kebutuhan infrastruktur agar dapat mengembangkan potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih mandiri secara finansial dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dialokasikan melalui Belanja Modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Mengoptimalkan lagi pemanfaatan Dana Alokasi Umum dengan tidak menggunakan seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) untuk biaya pegawai tetapi juga digunakan untuk mendorong kemajuan di daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian berguna untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai PAD, SiLPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya dengan melakukan analisis komparasi belanja daerah berdasar kan pengelompokkan daerah yang mandiri dan yang belum mandiri serta analisis komparasi belanja daerah berdasarkan luas wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini dan Sri Handayani. 2010. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik dalam Prespektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). Jurnal Ekonomi.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika, dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
- Mawarni, Darwanis dan Abdullah, Syukriy. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh). Jurnal Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syah Kuala
- Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Ni Luh Supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU dan SiLPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
- Soroga, Abudan Tebawo T, (2015), “Pengaruh Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Wardhana, Adhitya, Agus Kurniawan, dan Nury Effendi. 2011. Analisis Alokasi Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2004-2010. Jurnal Ekonomi Universitas Padjadjaran.